

**PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL SUDU DI KECAMATAN ALLA  
KABUPATEN ENREKANG**

**ZULFITRI**

Nomor Stambuk: 10561 04628 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Retribusi Terminal Sudu Di  
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.  
Nama Mahasiswa : Zulfitri  
Nomor Stambuk : 10561 04231 13  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Muhammad Idris, M. Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos.M. Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1113/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada Senin, 14 Agustus 2017



Dr. H. Muhammad Idris, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

- Ketua
- Sekretaris
- Penguji
1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Pd
  2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
  3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
  4. Nasrulhaq, S.Sos, MPA

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfitri

Nomor Stambuk : 10561 04628 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, termasuk dalam penegasan gelar akademik.

Makassar, 15 April 2017

Yang Menyatakan,

Zulfitri

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Terminal Suda di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.”** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo’akan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini serta, ucapan terimah kasih kepada Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelolah fakultas dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membantu penulis dalam segala penurusan administrasi penulis.
5. Seluruh pegawai Kantor Dinas Perhubungan dan pegas terminal Sudu Kabupaten Enrekang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis serta senantiasa membantu penulis dalam melengkapi data-data penulis.
6. Buat saudara-saudariku terane, khalawan-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan yang tiada tara baik moral, maupun materi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 15 April 2017



Zulfitri

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Penerimaan Tim .....	iv
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Manajemen .....	8
1. Pengertian Manajemen .....	8
2. Fungsi Manajemen .....	10
3. Unsur-Unsur Manajemen .....	17
4. Prinsip-Prinsip Manajemen .....	18
B. Konsep Retribusi Daerah .....	20
1. Pengertian Retribusi Daerah .....	20
2. Jenis Retribusi Daerah .....	22
3. Subjek dan Objek Retribusi Daerah .....	22
C. Konsep Retribusi Terminal .....	24
1. Pengertian Retribusi Terminal .....	24
2. Dasar Hukum Retribusi Terminal .....	25
3. Objek Retribusi Terminal .....	27
D. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	27
E. Kerangka pikir .....	29
F. Fokus Penelitian .....	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Informan Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Keabsahan Data .....	35

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	37
1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang .....	37
2. Geografi dan Iklim .....	38
3. Profil Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang .....	39
4. Profil Terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang .....	41
5. Karakteristik Informan .....	41
a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
b. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur .....	42
c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	43
d. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan .....	43
e. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatan .....	44
B. Pengelolaan Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang .....	45
1. Perencanaan .....	45
a. Perencanaan Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal .....	46
a. Perencanaan Penentuan Fasilitas Terminal .....	49
2. Pengorganisasian .....	51
a. Sumber daya Manusia .....	51
b. Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi .....	53
3. Penggerakkan .....	56
a. Motivasi kepada petugas terminal .....	56
b. Sistem penggajian kepada petugas terminal .....	58
4. Pengawasan .....	60
a. Pengawasan Langsung .....	61
b. Pengawasan Tidak Langsung .....	63



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 65  
B. Saran ..... 67

DAFTAR PUSTAKA ..... 69

LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1.	Bagan Kerangka Pikir .....	30



## DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.	Tabel Informan Penelitian .....	33
Tabel 2.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Tabel 3.	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur .....	42
Tabel 4.	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	43
Tabel 5.	Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan .....	44
Tabel 6.	Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya .....	44
Tabel 7.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Sudu Dari Tahun 2014 2016.....	48
Tabel 8.	Jenis dan Tarif Kendaraan Di Kabupaten Enrekang .....	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Terminal sudu adalah salah satu terminal yang terdapat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Terminal sudu merupakan sebuah terminal penumpang yang memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal sudu diresmikan pada tahun 2001 secara langsung oleh Bupati Kabupaten Enrekang dengan tujuan untuk penertiban keamanan lalu lintas agar aktivitas masyarakat lancar dan meningkat. Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengeluarkan surat himbauan hasil koordinasi kepolisian, dan Bupati Enrekang yang mewajibkan setiap angkutan umum AKAP/AKPD, dan sejenisnya masuk ke terminal. Dalam surat himbauan tersebut diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang/barang dalam terminal sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan pasal 276 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Beralih fungsinya terminal Sudu menjadi pasar kini menjadi keluhan warga sekitar. Pasalnya, kendaraan para pedagang dan warga yang datang berbelanja di pasar parkir dibadan jalan, hal ini membuat kemacetan yang sangat panjang. Selain itu, banyaknya bangunan-bangunan liar yang memenuhi area terminal, sehingga kendaraan tidak bisa di parkir dalam terminal serta, banyak pengguna kendaraan yang menjadikan halaman rumah warga sebagai lahan parkir. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kedaraan umum.

Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Berdasarkan PM No. 132 Th. 2015, penyelenggaraan terminal angkutan umum harus dilengkapi dengan fasilitas didalamnya baik itu fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, agar kendaraan yang masuk ke area terminal bisa lebih tertib dan mematuhi rambu-rambu yang telah disediakan.

Fasilitas utama dalam sebuah terminal yaitu jalur keberangkatan kendaraan, jalur kedatangan kendaraan, ruang tunggu penumpang, pengantar, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, perlengkapan jalan, fasilitas penggunaan teknologi, media informasi, penanganan pengemudi, pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service), fasilitas pengawasan keselamatan, ruang tunggu keberangkatan, ruang pembelian tiket, papan perambuan dalam terminal, Papan pengumuman, layanan bagasi, ruang penitipan barang, tempat berkumpul darurat (assembly point) dan jalur evakuasi bencana dalam terminal.

Fasilitas penunjang yaitu fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui, fasilitas pelayanan keamanan, fasilitas istirahat awak kendaraan, fasilitas pengendapan kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, tempat transit penumpang, alat pemadam kebakaran, dan fasilitas umum. Sekilas regulasi yang menjelaskan mengenai standar fasilitas terminal yang semestinya dimiliki oleh setiap terminal diseluruh Indonesia. Namun kondisi nyata yang ada saat ini, meskipun terdapat beberapa terminal dengan standar yang bagus dan telah sesuai namun, hal itu hanya terdapat pada sebagian kota saja. Kondisi fasilitas utama ataupun penunjang pada terminal pada umumnya sangat tidak layak dan tidak

nyaman untuk dikunjungi. Banyak permasalahan yang ada mulai dari awal ketika seorang calon penumpang akan menunggu di tempat tunggu atau menuju ketempat pemberhentian yang sesuai dengan kota atau daerah yang mereka tuju. Tidak ada jalan khusus yang memudahkan calon penumpang, mereka harus berjalan melewati jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, sehingga rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 33 disebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan / atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal, dimana terminal yang dimaksud dapat berupa terminal penumpang ataupun terminal barang. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, No. 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan harus dapat bekerja secara optimal dan efisien sehingga dapat mendukung mobilitas penduduk, dan ketertiban lalu lintas.

Masalah ini bukan hanya terjadi di Terminal Sudu Kabupaten Enrekang saja tapi sebagian terminal-terminal diseluruh Indonesia memiliki berbagai permasalahan yang sama. Dari beberapa permasalahan menyebabkan sistem manajemen pada setiap terminal yang ada semakin menurun. Pengelolaan retribusi terminal merupakan salah satu variable yang berperan dalam pengembangan transportasi, dapat menunjang aktivitas para pengguna jasa angkutan umum, dan pengelolaan retribusi terminal memiliki potensi besar

memberikan masukan pada kas daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang.

Pengelolaan retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan serta kebutuhan suatu daerah. Retribusi terminal merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang yang bersumber dari retribusi daerah. Hal ini terdapat dalam Perda Kabupaten Enrekang No.10 Tahun 2011 tentang retribusi izin terminal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 adalah "Retribusi Terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah".

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang bahwa, Pada Tahun 2014 targetnya sebesar Rp35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 46.876.000 selanjutnya Tahun 2015 targetnya sebesar Rp40.000.000 dan terealisasi Rp36.726.000 dan Tahun 2016 targetnya sebesar Rp40.000.000 dan teralisasi sebesar Rp26.304.000 (sumber: Kantor Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kab.Enrekang, Februari 2017). Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dari Tahun 2015-2016 belum mencapai target yang sudah ditentukan. Pemasukan daerah yang berasal dari PAD yang semakin menurun dari tahun ke tahun menjadi tumpuan yang utama dan dimaksimalkan oleh daerah, sehingga upaya-upaya dalam

pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus digali. Komponen yang mendukung PAD itu adalah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi tersebut setelah pajak.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu, Nasrum (dalam Josef Riwu Kaho, 2003:170) menjelaskan secara spesifik bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil pra-riset Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa penyebab belum mencapai target yaitu:

- a. Masih banyak kendaraan tidak mau masuk terminal
- b. Fasilitas terminal belum lengkap.

Pengelolaan terhadap retribusi terminal sudu Kabupaten Enrekang dinilai belum optimal akibatnya realisasi penerimaan retribusi terminal tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah daerah sehingga sangat perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah. Maka untuk melihat tahap pengelolaan retribusi terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang perlu kiranya dilakukan lebih jauh sebuah penelitian ilmiah untuk melihat sejauh mana



tahap dalam pengelolaan yang dilakukan selama ini sehingga peneliti mencoba mengambil judul **“Pengelolaan Retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan sebuah pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana perencanaan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana pengorganisasian retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana penggerakkan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?
4. Bagaimana pengawasan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin diketahui oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla dalam Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui penggerakkan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

4. Untuk mengetahui pengawasan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis adalah sebagai upaya untuk penjelasan tentang proses pengelolaan di Terminal Sudu dan juga dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan teori-teori manajemen pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Merupakan media bagi penulis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran dalam rangka turut memberikan kontribusi pemikiran tentang pelaksanaan pengelolaan Terminal sudu.
- b. Merupakan investasi berharga bagi penulis kelak apabila akan berkiprah dalam kehidupan sosial dan politik.
- c. Sebagai salah satu prasyarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Terry (2009:20) juga mengartikan pengelolaan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengertian manajemen diatas, terdapat beberapa bagian manajemen yang meliputi :

1. Unsur sifat, yaitu :
  - a. Manajemen sebagai suatu seni
  - b. Manajemen sebagai suatu ilmu
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan

3. Unsur sasaran, yaitu :

- a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari organisasi
- b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan

4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan mengurus, menangani. Kemudian dari kata kelola mengelola yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Mengelolah bagi pemerintahan adalah menyelenggarakan dan mengendalikan
- b. Mengelolah bagi perusahaan adalah mengurus dan menjalankan

Sedangkan, pengelolaan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memiliki arti proses perbuatan dan cara mengelolah melakukan sesuatu kegiatan dengan mengarahkan orang lain, dan proses mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Hal tersebut menunjukkan pada satu istilah yang disebut dengan manajemen.

Siswanto, (2005:21) pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang,

sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.

Pengelolaan dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Sobry, 2009:1). Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan serta pengendalian dan pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana (Hasibuan, 2004:41). Arti penting pengelolaan dalam konteks manajemen adalah memungkinkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasional secara bersama-sama. Selain itu pengelolaan memungkinkan kerjasama antar orang-orang dan individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

## **2. Fungsi Manajemen**

G.R.Terry dalam H.Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan

pengawasan/pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang harus menjalankan fungsi manajemen secara maksimal. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

**a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. Perencanaan menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman (2008:42) adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu yaitu :

- a. Siapa yang melakukan,
- b. Bilamana,
- c. Dimana, dan
- d. bagaimana cara melakukannya.

Sondang P Siagian (2005:36) mengatakan bahwa perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. T.Hani Handoko (2009:79) mengatakan bahwa dalam penetapan perencanaan yang baik, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :

1. Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
2. Merumuskan keadaan saat ini
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara. Cara-cara tersebut yaitu *pertama*, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. *Kedua*, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Rudyard Kipling, sastrawan Inggris yang terkenal. *Ketiga*, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis.

Pentingnya perencanaan tampak dari penjelasan Stoner dan Freeman dalam Silalahi (2011:150) adalah bahwa "tanpa rencana, manajer tidak bisa tahu bagaimana mereka harus mengatur orang dan sumber daya, mereka mungkin bahkan tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang mereka butuhkan untuk mengatur. Tanpa rencana, mereka tidak dapat memimpin dengan keyakinan atau mengharapkan lainnya untuk mengikuti mereka. Dan tanpa rencana, manajer dan pengikut mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mencapai tujuan mereka atau mengetahui kapan mereka menyimpang dari jalan mereka?".

## **b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan tugas-tugas, pekerjaan, wewenang, peran-peran termasuk koordinasi hubungan-hubungan antar bagian baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu struktur organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Semakin jelas dan terpadu tugas-tugas yang dirancang dalam suatu organisasi akan semakin efektif organisasi itu mencapai tujuannya (Ulber Silalahi, 2011:184). Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses



pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. Menurut Koontz dan Weihrich dalam Ulber Silalahi (2011:185), Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan tugas-tugas, pekerjaan, wewenang, peran-peran termasuk koordinasi hubungan-hubungan antar bagian baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu struktur organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Semakin jelas dan terpadu tugas-tugas yang dirancang dalam suatu organisasi akan semakin efektif organisasi itu mencapai tujuannya.

Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka dan pemberian lingkungan serta fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien (Siswanto, 2006:75). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan proses mendesain struktur formal, mengatur dan mengelompokkannya serta membagi tugas atau pekerjaan antara anggota organisasi sehingga terciptanya organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

### **c. Penggerakkan**

Penggerakkan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya

secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam melakukan pengarahan yaitu :

- a. Prinsip mengarah kepada tujuan
- b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan
- c. Prinsip kesatuan komando

Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa:

- a. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
- b. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
- c. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya.

**d. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan

standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun. Terdapat berbagai definisi pengawasan yang diberikan oleh para ahli, menurut Sutikno Sobry, (2012:53) pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu.

Siswanto dan Sastrohadiwiry, (2003:26) pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya. Simbolon (2004:62) menjelaskan fungsi pengawasan sebagai berikut:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu : pengawasan langsung (*direct control*)

dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung. Akan tetapi, karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pimpinan sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa para bawahan sering kali hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada laporan saja, karena itu pengawasan terhadap proses manajemen cukup apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

### 3. Unsur-unsur manajemen

Unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen menurut Manullang, (2005:173) menyebutkan manajemen memiliki unsur-unsur yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan yaitu 6M +1 I meliputi :

- a. *Man* (manusia) yaitu merupakan unsur pendukung yang paling penting untuk pencapaian sebuah tujuan yang telah ditentukan sehingga berhasil atau gagal suatu manajemen tergantung pada kemampuan untuk mendorong dan menggerakkan orang-orang kearah tujuan yang hendak dicapai.

- b. *Money* (uang) yaitu Untuk melakukan berbagai aktifitas diperlukan uang, seperti gaji atau upah. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
- c. *Material* adalah dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan- bahan (*material*), karenanya dianggap sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan.
- d. *Machine* (mesin) , Peranan mesin sangat dibutuhkan agar proses produksi dan pekerjaan bisa berjalan efektif dan efisien.
- e. *Method* (metode) yaitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternative atau cara melakukan pekerjaan.
- f. *Market* (pasar), bagi badan yang bergerak dibidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya adalah pasar, tanpa adanya pasar bagi hasil produksi jelas tujuan perusahaan industri tidak mungkin akan tercapai.
- g. Informasi adalah Segala informasi digunakan dalam melakukan kegiatan suatu dalam perusahaan. Informasi sangat dibutuhkan di dalam manajemen. Informasi tentang apa yang sedang terkenal sekarang ini, apa yang sedang disukai, apa yang sedang terjadi di masyarakat. Manajemen informasi sangat penting juga untuk menganalisis produk yang telah dan akan di pasarkan agar kebutuhan dapat terpenuhi.

#### **4. Prinsip-prinsip Manajemen**

Henry Fayol manajemen mempunyai 14 prinsip manajemen yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas, namun sifatnya fleksibel maksudnya tidak

harus diterapkan sekaligus, melainkan disesuaikan dengan situasi yang ada.

Adapun prinsip manajemen menurut Henry Fayol adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian kerja, berhubungan dengan prinsip spesialisasi dalam rangka efisiensi penggunaan tenaga kerja.
- b. Wewenang dan tanggung jawab, keduanya mempunyai hubungan, sebab tanggung jawab merupakan akibat yang wajar dan timbul dari adanya wewenang.
- c. Disiplin yaitu sikap menghormati perjanjian-perjanjian yang dijuruskan mencapai ketaatan pada peraturan-peraturan yang ada. Untuk itu diperlukan atasan yang baik pada semua tingkatan.
- d. Kesatuan perintah, seorang pegawai hendaknya menerima perintah-perintah dari hanya seorang atasan saja.
- e. Kesatuan jurusan, setiap kegiatan yang mempunyai sasaran sama harus mempunyai seorang kepala dan satu rencana.
- f. Kepentingan perseorangan harus tunduk dan diatasi oleh kepentingan kelompok.
- g. Pembayaran upah pegawai dan caranya supaya adil dan memberi kepuasan maksimum bagi pegawai dan majikan.
- h. Pentingnya pembatasan wewenang mana yang dipusatkan dan mana yang dibagi-bagi kepada bagiannya.
- i. Hierarki atau rantai berskala, yaitu rangkaian pengawas atau suatu garis wewenang yang jelas.
- j. Perlunya ketertiban, baik ketertiban material dan sosial.
- k. Keadilan, supaya bawahan mau setia dan taat kepada pimpinan.

- l. Stabilitas dari pegawai, supaya dapat menghemat ongkos.
- m. Pada bawahan harus diberikan kesempatan mengungkapkan dan menjalankan inisiatif.
- n. *Esprit de corps* atau kesetiaan pada kelompok, ini menunjukkan perlunya kerja sama kelompok serta perlunya komunikasi untuk mencapainya.

## **B. Konsep Retribusi Daerah**

### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi adalah sumber pokok daerah di samping pajak yang memiliki potensi cukup besar pada kas daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Josef Riwu Kaho (2003:17) Retribusi Daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara ataupun merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Definisi di atas mengartikan retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepada Negara yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut. Penekanan pada pengertian tersebut adalah jasa, artinya pemungutan retribusi berdasarkan atas tersedianya jasa oleh Negara. Selain itu, ada unsur paksaan dalam pembayaran retribusi yang sifatnya ekonomis bagi yang merasakan jasa dari pemerintah. Mengenai konteks daerah, retribusi tidak hanya pembayaran jasa tetapi juga berkaitan dengan pembayaran atas pemberian izin.

Ahmad Yani (2002:55) menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Panitia Nasrum (dalam Josef Riwu Kaho, 2003:170) menjelaskan secara spesifik bahwa : “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui beberapa ciri pokok retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan sector penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, yaitu pos-pos penerimaan retribusi dapat diadakan sebanyak mungkin selama pemerintah daerah menyediakan jasa atas retribusi, dengan mempertimbangkan kelayakan objek retribusi berdasarkan nilai sosial ekonomi. Artinya, penerimaan sector retribusi akan dapat optimal apabila pemerintah daerah mampu menggalinya. Josef Riwu Kaho (2003:176), dalam bukunya yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* mengemukakan secara umum, keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara liminitif seperti halnya sektor pajak. Pembatasan utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang



disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa itu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **2. Jenis Retribusi Daerah**

Ahmad Yani (2002:56), Jenis Retribusi Daerah meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **3. Subjek dan Objek Retribusi Daerah**

Ahmad Yani (2002 : 56), Subjek Retribusi Daerah meliputi :

1. Subjek Retribusi Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa umum.
2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Sedangkan Objek Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:56) meliputi:

1. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang termasuk retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi

terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelayanan yang termasuk retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dll.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis retribusi yang ada. Retribusi jasa umum tarifnya didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan retribusi perizinan tertentu tarifnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## **C. Konsep Retribusi Terminal**

### **1. Pengertian Retribusi Terminal**

Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pengelolaan retribusi terminal sangat diperlukan dalam memanfaatkan potensi yang ada khususnya retribusi terminal, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Pengertian retribusi terminal disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 adalah “Retribusi Terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pemanfaatan terminal angkutan penumpang dan fasilitas terminal lainnya.

### **2. Dasar Hukum Retribusi Terminal**

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan retribusi terminal yaitu:

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 tentang Objek Retribusi Terminal.
3. Peraturan Daerah Kab. Enrekang No.10 Tahun 2011 tentang retribusi izin terminal.
4. Peraturan Bupati Kab.Enrekang No.7 Tahun 2016 Tentang peninjauan tarif retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir.

Syaripuddin (2010:34) mengemukakan bahwa retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/ barang dengan kendaraan umum. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa:

1. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum.
2. Tempat Kegiatan Usaha.
3. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah daerah.
4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkut kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa

usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa.

### 3. Objek Retribusi Terminal

Objek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :

#### a. Terminal Penumpang:

1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk Menaikkan, menurunkan penumpang umum, dan selama menunggu keberangkatan.
2. Jasa penggunaan fasilitas terminal.
3. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.

#### b. Terminal Barang:

1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat.
2. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan.
3. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang.
4. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.

### D. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 34 tahun 2000 tentang pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan

pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-undang juga mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelolah dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, dengan kata lain bahwa kepala daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah. Disamping itu, daerah memiliki kewenangan yang amat besar untuk mengelola sumber daya yang ada agar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan sebagai sumber PAD guna pembangunan daerah. Menurut UU 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan menurut Josef Riwu Kaho (2003:143) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

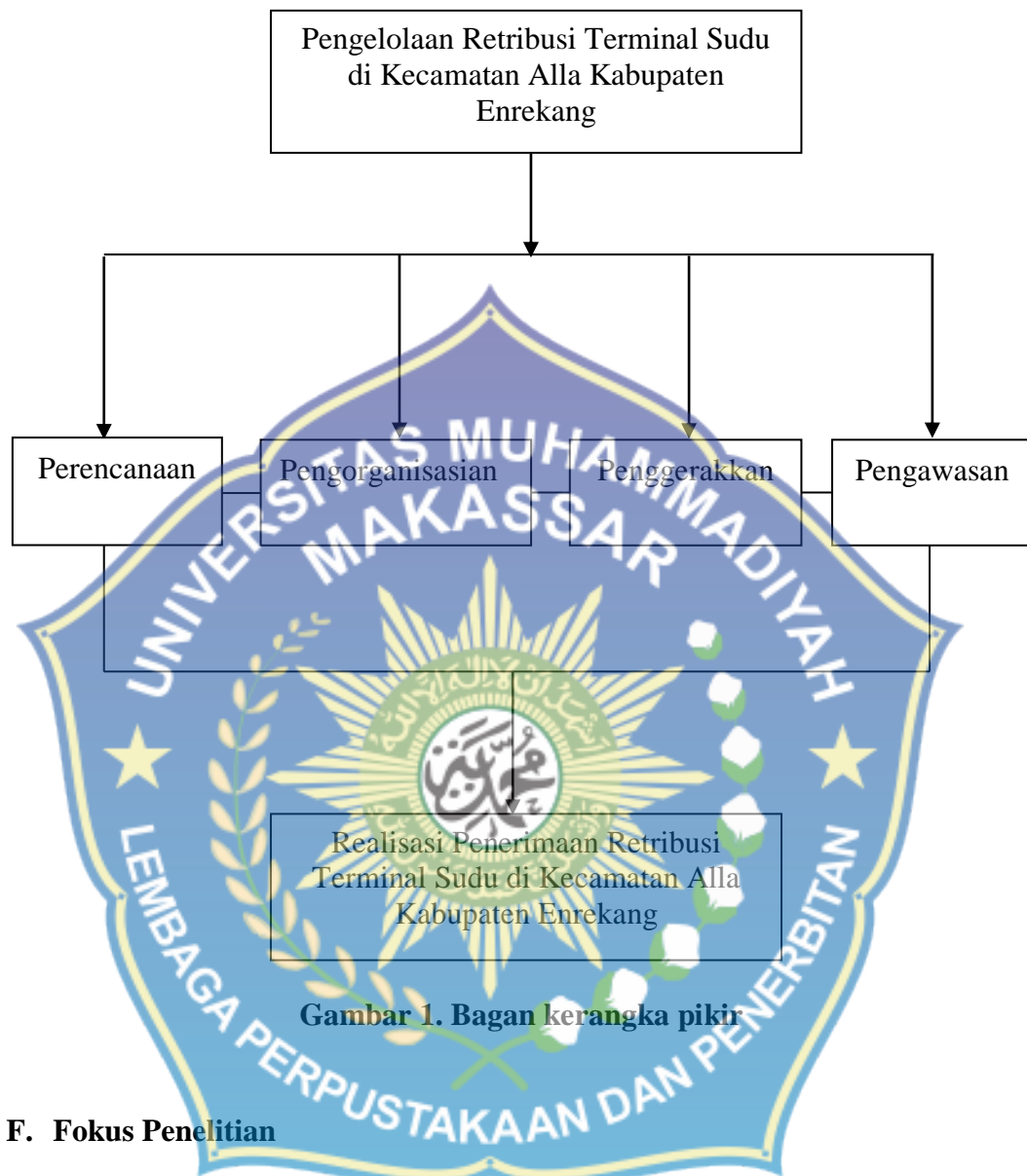
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Perusahaan daerah. Dinas daerah
4. Pendapatan daerah lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk membiayai daerahnya.

#### **E. Kerangka Pikir**

Terminal merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem transportasi karena merupakan titik simpul dan suatu kegiatan. Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya retribusi terminal. Akan tetapi penerimaan dari sektor retribusi terminal ini belum optimal. Pengelolaan penerimaan retribusi terminal sudu di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan terminal yang dalam pengelolaannya terdiri dari 4 bagian yaitu (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penggerakkan, dan (d) pengawasan. Untuk mengetahui lebih jelas kerangka pikir dalam penelitian ini maka dapat dilihat pada bagan berikut ini:





**Gambar 1. Bagan kerangka pikir**

#### **F. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan terminal sudu yang meliputi variabel-variabel pengelolaan terminal yaitu (a) Perencanaan, (b) Pengorganisasian, (c) penggerakkan dan (d) Pengawasan.

#### **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Perencanaan yaitu penyusunan dan penentuan aktivitas yang akan

dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan indikator (a) Perencanaan penentuan target anggaran dan (b) Perencanaan penentuan fasilitas terminal.

2. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dalam pelaksanaan pemungutan diperlukan (a) Sumber daya manusia dan (b) dan Cara pelaksanaan pemungutan retribusi.
3. Penggerakkan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Penggerakkan dalam hal ini meliputi (a) Motivasi kepada petugas terminal, dan (b) Sistem penggajian kepada petugas terminal.
4. Pengawasan yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan indikator (a) Pengawasan langsung dan (b) Pengawasan tidak langsung.
5. Realisasi penerimaan adalah seberapa besar pencapaian dari retribusi terminal yang telah diraih untuk kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 11 April 2017. Lokasi penelitian telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang dan di Terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan retribusi di Terminal Sudu belum optimal.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. (Moleong 2008:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang diarahkan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan fenomena, fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis tentang Pengelolaan Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

##### **2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai permasalahan yang terjadi pada proses Pengelolaan Terminal Sudu Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana

data dapat diperoleh. Data hasil penelitian didapatkan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

- a) Data Primer merupakan data yang didapatkan dari informan utama. Sumber data primer yang diperoleh peneliti yaitu dengan cara mewawancarai para informan, observasi dan dokumentasi.
- b) Data Sekunder yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur buku yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan retribusi terminal.

#### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah informan dari berbagai pihak.

Berikut ini daftar informan penelitian:

Tabel 1. Informan penelitian

No	NAMA	INISIAL	Jabatan	Ket.
1.	Muzakkir S.sos M.Si.	MK	Kepala DISHUB, INFOKOM	1
2.	Hasriani Latman S.Pd S.E M.AP	HL	Kepala Seksi Terminal	1
3.	Hasmin S.E	HN	Kordinator Kolektor	1
4.	Asdar	AD	Kolektor /petugas terminal	1
5.	Hasrul S.Pd	HS	Kolektor /petugas terminal	1
6.	Arman	AN	Kolektor /petugas terminal	1
7.	Johan	JH	Masyarakat	1
8.	Irman S.KM	IM	Masyarakat	1
9.	Sainal	SN	Masyarakat	1
<b>Jumlah :</b>				<b>9</b>

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan orang-orang yang dinilai berwenang atau informasi yang ditempuh penulis dengan melakukan komunikasi langsung dengan beberapa informan yakni Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Kepala seksi terminal, kordinator kolektor pemungutan retribusi, dan masyarakat pengguna jasa terminal.

### 2. Observasi

Observasi, adalah pengamatan langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data atau fakta sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lapangan, yaitu terminal sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa lokasi terminal sudu masih belum mengalami perkembangan seperti dengan fasilitas didalam terminal yang masih kurang lengkap dan juga dengan adanya kendaraan yang tidak masuk kedalam terminal sudu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman Sugiyono (2014) teknik analisis yang digunakan secara interaktif melalui proses sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data field note. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian.

### 2. Sajian Data (*data display*)

Dalam hal peneliti dalam menyajikan data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja, dan lainnya yang berfungsi sebagai pendukung narasinya.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang dia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

## G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji *depenabilitas* (*reliabilitas*) data, uji *transferabilitas* (*validitas eksternal/generalisasi*), dan uji *komfirmabilitas* (*obyektivitas*). Namun, dalam penelitian yang paling penting adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

## 2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## 3. Triangulasi Teknik

Dilakukan untuk menguji sumber data, memiliki tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kab. Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan Enrekang dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan, sudah mendekati kepastian sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung mengambil  $\pm 85\%$  dari seluruh luas wilayah yang luasnya  $\pm 1.786.01 \text{ Km}^2$ .

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 12 Kecamatan dan 129 desa yang telah beberapa kali mengalami perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa dengan jumlah penduduk tahun 2014 yaitu 198.194 jiwa yang terdiri dari laki-laki 99.490 jiwa dan perempuan 98.704 jiwa. Kabupaten Enrekang juga terkenal dengan keindahan alamnya, deretan pegunungan yang indah bisa kita nikmati di sepanjang jalan di Kabupaten Enrekang dan juga memiliki banyak obyek wisata alam yang mengagumkan seperti permandian alam lewaja, air terjun paladang, air terjun lambai, bukit



cekong, villa bambapuang, situs goa tontonan, kebun raya enrekang, gunung latimojong, buttu kabobong/gunung nona, lo'ko bubau, sapo kaluppini (rumah kaluppini), desa Bone-Bone (kampung bebas asap rokok), situs benteng alla, serta lo'ko malillin (goa malillin) dan lo'ko tappaan (goa tappaan).

## 2. Geografi dan Iklim

Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung, dimana luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 2,83% dari total wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi  $3^{\circ}14'36''$ -  $3^{\circ}50'00''$  Lintang Selatan dan antara  $109^{\circ}40'53''$  -  $120^{\circ}6'33''$  Bujur Timur dengan batas wilayah sebelah utara adalah Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur Kabupaten Luwu, sebelah selatan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah  $1.786,01 \text{ km}^2$  dengan topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus – Oktober.

### **3. Profil Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang**

Dewasa ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan menempatkan Negara pada posisi sebagai pembuat kebijakan, regulator dan fasilitator, maka sejalan dengan hal tersebut otonomi daerah yang menekankan pemberdayaan pemerintah dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang baik (Good Government).

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang menekankan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara Profesional dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma tersebut berimplikasi pada format kelembagaan dan pelaksanaan tugas – tugas di berbagai sector termasuk sector Perhubungan, Infomasi dan Komunikasi dengan Elektronik Government (E – Government). Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi Kabupten Enrekang merupakan institusi yang harus melaksanakan amanat rakyat dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi yang berfungsi memberikan pelayanan Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

Visi yang dimiliki Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang adalah “terwujudnya pelayanan transportasi berkualitas, masyarakat sadar informasi untuk mewujudkan Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan unggulan, dan sejahtera. Sedangkan Misi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang adalah:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan pra sarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat.
2. Terwujudnya pemberian peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan dikawasan pedesaan kawasan tertinggal dan kawasan terpencil untuk menciptakan suasana aman dan damai.
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di Bidang Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi Kabupaten Enrekang.
6. Terwujudnya kebijakan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi pada instansi pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang.
7. Terwujudnya hubungan interaktif antara masyarakat, media informasi dan pemerintah.
8. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi pada instansi Pemerintah (E-Government) untuk memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat Secara efektif dan transparan.
9. Terwujudnya Peningkatan kualitas Informasi dan komunikasi di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Terwujudnya peningkatan kinerja dan citra aparat Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

#### **4. Profil Terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang**

Terminal Sudu berada di Belajen (Jln.poros Makassar-Toraja) Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Terminal Sudu memiliki luas wilayah 1.050 m<sup>2</sup>. Di sebelah Utara Desa Sumillan, sebelah Timur Kelurahan Buntu Sugi, sebelah Selatan Desa Taulo dan sebelah Barat Kelurahan Kalosi. Terminal sudu diresmikan pada tahun 2001 secara langsung oleh Bupati Kabupaten Enrekang dengan tujuan untuk penertiban keamanan lalu lintas agar aktivitas masyarakat lancar dan meningkat. Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengeluarkan surat himbauan hasil koordinasi kepolisian, dan Bupati Enrekang yang mewajibkan setiap angkutan umum AKAP/AKPD, dan sejenisnya masuk ke terminal. Tenaga kerja di terminal Sudu berjumlah 12 orang yaitu tenaga honorer 6 orang, Pegawai Negeri Sipil 5 orang, petugas sukarela 1 orang.

Keberadaan terminal Sudu ini, pemerintah harus tanggap dan membuat peraturan-peraturan yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi terminal Sudu. Keberadaan terminal Sudu memang banyak memiliki kekurangan seperti lokasinya yang kurang tertata, dan fasilitasnya yang masih kurang. Akan tetapi, terminal Sudu sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang sehingga sudah selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Enrekang mengelola terminal Sudu dengan baik.

#### **5. Karakteristik Informan**

Berikut adalah karakteristik menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

## 1. Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	7	77,78 %
Perempuan	2	22,22 %
Jumlah	9	100 %

Sumber: diolah dari data primer, Februari 2017

Distribusi informan tentang jenis kelamin berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 7 orang berjenis laki-laki atau sebesar 77,78 % dan 2 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 22,22 % dari keseluruhan informan yang ada.

## 2. Karakteristik informan berdasarkan umur

Penelitian ini menggunakan karakteristik informan berdasarkan umur. Karakteristik informan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur.

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
26 - 36	3	33,33 %
37 - 46	3	33,33 %
47 - 56	2	22,22 %
57 tahun ke atas	1	11,11 %
Jumlah	9	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Februari 2017

Tabel tersebut di atas memperlihatkan distributor informan berdasarkan umur dimana menerangkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang

berkisar 37-46 tahun yang menunjukkan sebanyak 3 orang informan atau 33,33 % dari jumlah informan, informan yang memiliki umur sekitar 26-36 tahun sebanyak 3 orang atau 33,33 %, informan yang berumur 47-56 tahun sebanyak 2 orang atau 22,22 % serta informan yang berusia 57 tahun ke atas sebanyak 1 orang atau 11,11 % dari keseluruhan jumlah informan yang ada.

### 3. Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian menurut tingkat pendidikannya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
S2	2	22,22 %
S1	3	33,33 %
SMA	3	33,33 %
SMP	1	11,11 %
Jumlah	9	100 %

Sumber: diolah dari data primer, Februari 2017

Distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikannya menerangkan bahwa 2 orang berpendidikan S2 atau sebanyak 22,22 % dari jumlah informan. 3 orang berpendidikan S1 atau sebanyak 33,33 % dari jumlah informan, tingkat pendidikan SMA sebanyak 3 orang atau 33,33 % dan jumlah tingkat pendidikan informan yang SMP sebanyak 1 orang atau 11,11 % dari jumlah informan yang ada.

### 4. Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut pekerjaan yang dapat ditunjukkan pada table dibawah ini:

Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan.

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
PNS	3	33,33%
Wiraswasta	3	33,33%
Supir Angkutan	2	22,22 %
Pedagang	1	11,11 %
Jumlah	9	100 %

Sumber: diolah dari data primer, Februari 2017

Distribusi informan tentang pekerjaannya berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 3 orang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau 33,33 % dari jumlah informan, 3 orang informan berprofesi sebagai wiraswasta atau 33,33 % dari jumlah informan, berprofesi sebagai supir angkutan yaitu sebanyak 2 orang atau 22,22 % dari jumlah informan, dan sisanya pedagang Jumlahnya 1 orang atau 11,11 % dari jumlah keseluruhan informan yang ada.

##### 5. Karakteristik informan berdasarkan pendapatannya

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian berdasarkan pendapatan perbulan juga sangat dibutuhkan dalam pengolahan data. Karakteristik informan berdasarkan pendapatan perbulan dapat ditunjukkan pada tabel sebagai Berikut:

Tabel 6. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
Rp.1.000.000-Rp.2.000.000	2	22,22 %
Rp.2.100.000-Rp.3.000.000	4	44,44 %
Rp.3.100.000-Rp.4.000.000	3	33,33 %
Jumlah	9	100 %

Sumber: diolah dari data primer, Februari 2017

Distribusi informan tentang pendapatan perbulan berdasarkan tabel diatas yaitu menunjukkan bahwa informan yang berpenghasilan sebesar Rp1.000.000-Rp2.000.000 sebanyak 2 orang atau 22,22 % dari jumlah informan, Rp2.100.000-Rp3.000.000 sebanyak 4 orang atau 44,44 % dari jumlah informan, dan informan yang berpenghasilan sebanyak Rp3.100.000-Rp4.000.000 sebanyak 3 orang atau 33,33 % dari jumlah informan yang ada.

## **B. Pengelolaan Terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang**

Pengelolaan Retribusi Terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Infokom Kabupaten Enrekang khususnya Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang melakukan tugas di bidang Pengelolaan Terminal. Dengan ini peneliti akan menjelaskan tiga indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi terminal yang meliputi (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penggerakkan dan (d) pengawasan.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif didalam pemanfaatannya.

Menelaah mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan,



Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang dalam bidang pengelolaan Terminal, maka terdapat dua indikator meliputi (a) perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal dan (b) perencanaan penentuan fasilitas terminal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut:

### **1.a Perencanaan Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal**

Pengelolaan terminal tidak lepas dari perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal karena merupakan suatu hal yang penting dalam Peningkatan realisasi penerimaan retribusi terminal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MK selaku Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mengungkapkan bahwa:

“Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal, terdapat langkah berupa Seksi Terminal bersama Kepala Dinas dan mengajukan usulan target anggaran kepada DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten Enrekang untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Enrekang. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan”. (Wawancara dengan MK, 28 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa penentuan target anggaran dilakukan musyawarah oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain kepala dinas Perhubungan, Infokom, seksi terminal, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan DPRD Kabupaten Enrekang kemudian setelah mencapai kesepakatan barulah target yang disetujui direalisasikan.

Wawancara dengan HL selaku kepala seksi terminal mengungkapkan bahwa:

“Harusnya Penentuan target pertahun harus dilakukan didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap terminal maksudnya dalam penentuan target ini harus disesuaikan berapa jumlah kendaraan yang masuk dalam objek terminal. Oleh karena itu, penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai

itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi terminal pertahun” (Hasil wawancara dengan HL, 28 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa penentuan target anggaran senantiasa dilakukan tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki terminal. Sehingga hampir setiap tahunnya realisasi retribusi terminal tidak pernah mencapai target. Belum tercapainya target penerimaan ini memunculkan banyak spekulasi. Diantaranya soal lemahnya prediksi potensi penerimaan atau tingginya target yang ditetapkan Pemda Kabupaten Enrekang. Jadi untuk penetapan target harusnya disesuaikan dengan potensi yang ada, khususnya pada jumlah angkutan yang ada.

Hal lain juga dikatakan HL selaku kepala seksi terminal mengatakan bahwa:

“Penentuan target anggaran yang kami lakukan setiap tahunnya selalu berubah-ubah karena kami melihat dari realisasi dari tahun sebelumnya. Jika realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melebihi target, maka kami menaikkan target untuk 1 tahun kedepan. begitupun sebaliknya, jika realisasi tahun sebelumnya tidak mencapai target, maka kami menurunkan ataupun tetap pada target dari tahun sebelumnya.” (Hasil wawancara dengan HL, 6 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa penentuan target anggaran berdasarkan pada realisasi yang dicapai dari tahun sebelumnya sehingga penentuan target selalu berubah-ubah.

Wawancara dengan AD selaku perwakilan dari kolektor pemungutan retribusi terminal Sudu mengatakan bahwa:

“Mengenai penentuan target anggaran disini berdasarkan data tentang potensi terminal. Tapi, karena tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya serta pembangunan terminal yang membutuhkan waktu yang lama sehingga realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan”. (Hasil wawancara dengan AD, 8 Maret 2017).

Terkait dari perkataan AD selaku perwakilan dari kolektor terminal Sudu dapat disimpulkan bahwa tidak adanya data akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HN selaku Kordinator Kolektor retribusi Terminal mengungkapkan bahwa:

“Tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh Jumlah masyarakat (pengguna jasa) yang tidak menentu dan masih banyak juga masyarakat yang tidak sadar dengan wajib retribusi terminal sehingga membuat kita kesulitan untuk mendata mereka.” (Hasil wawancara dengan HN, 03 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan karena para petugas pemungut retribusi terminal kesulitan dalam mendata setiap masyarakat (pengguna jasa). Berdasarkan hasil penelitian maka data realisasi penerimaan retribusi terminal dapat diketahui dengan melihat data tentang target dan realisasi penerimaan retribusi terminal Kabupaten Enrekang dari Tahun 2014-2016. Adapun tabelnya mengenai hal ini dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel 7: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Dari Tahun 2014-2016 di Terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2014	Rp5.000.000	Rp7.050.000	141 %
2.	2015	Rp8.000.000	Rp6.544.000	81,8 %
3.	2016	Rp8.000.000	Rp5.304.000	66,3 %

Sumber: Dishub, Infokom Kabupaten Enrekang Juni, 2017

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Realisasi penerimaan dari tahun ketahun. Dan di tahun 2014 Realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp7.050.000,00 atau 141 % dari target anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2015 realisasi penerimaan menurun yaitu Rp6.544.000,00 atau 81,8 % dari target anggaran. Dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan yaitu Rp5.304.000,00 atau 66,3 % dari target yang telah ditetapkan dan hal ini realisasi tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target anggaran retribusi.

#### **1.b Perencanaan Penentuan Fasilitas Terminal**

Fasilitas merupakan faktor penting dalam pengelolaan retribusi terminal. Pengadaan/penyediaan fasilitas terminal harus memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam menyelenggarakan fasilitas terminal dengan dibantu oleh Kepala Terminal Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HL kepala Seksi Terminal Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa:

“Tentunya kami telah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa meningkatkan kenyamanan dan memberikan kepuasan bagi pengguna jasa di terminal. Ada beberapa fasilitas umum yaitu salah satunya WC/toilet.” (Hasil wawancara dengan HL,10 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyediakan fasilitas dalam terminal agar masyarakat merasa nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN selaku perwakilan kolektor terminal Sudu mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, kami tetap berupaya untuk bisa meningkatkan dan mengoptimalkan perbaikan terhadap kerusakan fasilitas yang ada seperti perbaikan jalan masuk ke lokasi terminal. Namun, pemerintah dalam hal Dinas terkait mendapat kendala terutama dalam keterbatasan anggaran.” (Hasil wawancara dengan AN, 10 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dinas terkait sudah berupaya mengoptimalkan dalam perbaikan fasilitas terminal seperti perbaikan jalan namun, terkendala dalam anggaran.

Terkait hasil wawancara dengan HS selaku petugas terminal bahwa:

“Disini fasilitas terminalnya masih kurang lengkap. hanya ada beberapa fasilitas yang tersedia misalnya WC, tempat parkir, karcis dan tempat mencatat para petugas terminal. Oleh karena itu, banyak mobil angkutan yang malas masuk ke terminal (wawancara dengan HS, 15 Maret 2017).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas terminal diatas, maka dapat dikatakan bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat dalam terminal masih kurang lengkap sehingga masih banyak masyarakat yang malas masuk ke lokasi terminal.

Wawancara dengan SN selaku masyarakat pengguna jasa terminal mengemukakan bahwa:

“Mengenai fasilitas yang ada di disini, saya rasa pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, buktinya pemerintah telah melakukan perbaikan jalan menuju lokasi terminal ini.” (Hasil wawancara dengan SN, 16 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan jalan menuju lokasi terminal.

Wawancara dengan IM selaku masyarakat pengguna jasa terminal mengatakan bahwa:

“Saya senang datang kesini karena tempat parkir kendaraannya yang luas, dan WC yang bersih. Tapi masih ada fasilitas yang kurang yaitu tempat

shalat atau mushollah. Harusnya pemerintah juga mnyediakan fasilitas untuk beribadah karena itu sangat penting.” (Hasil Wawancara dengan IM, 18 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan IM selaku pengguna jasa fasilitas terminal diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas dalam terminal akan tetapi, fasilitas tersebut masih kurang lengkap, salah satunya fasilitas peribadatan (Musholla), papan rambu lalu lintas, dan lain-lain.

## **2. Pengorganisasian (Organizing)**

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti (a) sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, (b) cara pelaksanaan pemungutan retribusi. Kedua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal.

### **2.a Sumber Daya Manusia**

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogianya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah

pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal Sudu diketahui dari HL selaku Kepala seksi terminal yang mengatakan bahwa:

“Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor dari Dinas Perhubungan berjumlah 10 orang yang melakukan pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi yang ada di terminal dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi” (wawancara dengan HL, 15 Maret 2017).

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa jumlah pegawai/kolektor yang melaksanakan pemungutan retribusi di terminal Sudu sudah sangat seimbang dengan wajib retribusi yang ada di terminal. Dengan demikian pemungutan retribusi di terminal Sudu bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor pemungutan retribusi menyatakan bahwa:

“Kolektor yang ditugaskan di terminal Sudu ini sebanyak 10 orang yang kemudian dibagi tugas yaitu 5 untuk sepeda motor, 3 orang untuk mobil penumpang, dan 2 orang untuk mobil truk pengangkut barang.” (wawancara dengan HN, 15 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kolektor/petugas pemungut retribusi terminal Sudu sebanyak 10 orang dan dibagi menjadi 3 bagian.

Wawancara dengan HS selaku kolektor pemungutan retribusi terminal Sudu menyatakan bahwa:

“Memang benar, kami disini ditugaskan 10 orang sebagai kolektor untuk pemungutan retribusi. Dan saya ditugaskan di pemungutan retribusi bagian mobil angkutan barang (truk).” (wawancara dengan HS, 16 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kolektor yang ditugaskan di terminal Sudu berjumlah 10 orang yang kemudian dibagi tugas yaitu bagian sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil truk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN selaku kolektor pemungutan retribusi menyatakan bahwa:

“Saya di tugaskan dibagian pemungutan retribusi untuk sepeda motor dan kami berjumlah 5 orang. Selain itu, saya juga biasa di beri tugas di bagian mobil penumpang dan jumlah kolektornya sebanyak 3 orang. Itu sangat memudahkan kami dalam pemungutan retribusi terminal.” (wawancara dengan AN, 16 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembagian kolektor sebanyak 5 orang di bagian sepeda motor dan 3 orang di bagian mobil penumpang sangat memudahkan para kolektor dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Memang benar, petugas di terminal ini lumayan banyak karena di bagian motor saya biasanya melihat petugasnya 5 orang. Dan mengenai petugas di bagian mobil saya kurang tahu karena lokasi parkir mobil dan motor berbeda.” (wawancara dengan SN, 16 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kolektor pemungutan retribusi bagian sepeda motor lebih banyak dibandingkan dengan kolektor di bagian mobil. Dan lokasi parkir motor dan mobil pun berbeda.

## **2.b Cara pelaksanaan pemungutan retribusi**

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal Sudu di Kab. Enrekang dilakukan hari senin, selasa, kamis dan hari jumat. Adapun metode yang pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal Sudu seperti yang dikatakan oleh HN selaku Kordinator kolektor terminal Sudu bahwa:



“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang berjalan selama ini para petugas/kolektor mendatangi langsung para pengguna fasilitas terminal dimana mereka di berikan langsung karcis pada saat mereka akan keluar dari terminal.” (wawancara dengan HN, 15 Maret 2017).

Mengenai hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang berjalan selama ini para petugas/kolektor mendatangi langsung para pengguna fasilitas terminal dimana mereka di berikan langsung karcis pada saat mereka akan keluar dari terminal.

wawancara dengan IM selaku masyarakat (pengguna jasa) mengatakan bahwa:

“Selama ini proses pembayaran retribusi terminal yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami untuk menagih dan memberikan karcis kemudian kami membayar sesuai dengan tarif yang sesuai dengan karcis yang diberikan oleh para kolektor.” (wawancara dengan IM, 15 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pembayaran retribusi terminal yang dilakukan oleh para kolektor cukup baik karena para kolektor langsung mendatangi para pengguna jasa dan memberikan langsung karcis sehingga para pengguna jasa terminal cukup mudah dalam membayar tarif retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor pemungutan retribusi menyatakan bahwa:

“Tarif pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai dengan PERBUP Kabupaten Enrekang.” (Hasil wawancara dengan HN, 18 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa aparat terminal telah melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan yaitu PERBUP Kabupaten Enrekang No.7 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang peninjauan tariff retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir maka tarif dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8: Jenis dan Tarif Kendaraan Di Kabupaten Enrekang

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)
1.	Sedan, jeep,pick up dan mini bus	4.000
2.	Bus, Truck, dan Alat besar lainnya	5.000
3.	Sepeda Motor dan Pengguna fasilitas lainnya	2.000

Sumber: Dishub, Infokom Kabupaten Enrekang, Februari 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan AD selaku Kolektor pemungutan retribusi terminal menyatakan bahwa:

“Disini kami melakukan pemungutan retribusi dengan secara langsung memberikan karcis kepada masyarakat (pengguna jasa) terminal ini. Dan dikarcis tersebut sudah tertera tarif yang harus dibayar.” (Hasil wawancara dengan AD, 18 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kolektor pemungutan retribusi dalam pemungutan retribusi dengan memberikan karcis secara langsung kepada masyarakat (pengguna jasa).

Sedangkan wawancara dengan SN selaku masyarakat pengguna jasa terminal menyatakan bahwa:

“Memang benar kalau saya menggunakan mobil, saya dikenai tarif Rp 4.000 dan jika saya menggunakan motor biayanya Rp 2.000 dan saya tidak pernah complain karena para kolektor langsung memberi karcis dan dikarcis sudah tertulis biayanya jadi saya membayar sesuai yang ada dikarcis.” (Hasil wawancara dengan SN, 18 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tarif pada kendaraan roda empat yaitu Rp 4.000 sedangkan, pada kendaraan roda dua Rp 2.000.

### 3. Penggerakkan (Actuating)

Penggerakkan (*actuating*) artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Di dalam manajemen, penggerakkan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun indikator penggerakkan meliputi dua hal yaitu (a) motivasi kepada petugas terminal, dan (b) sistem penggajian kepada petugas terminal.

#### 3.a Motivasi kepada petugas terminal

Pemberian motivasi tidak terlepas dari kebutuhan individu itu sendiri dan berbagai fakta internal yang membuat seseorang puas. Pemberian motivasi para pegawai terminal dapat bertujuan untuk mendorong gairah dan semangat kerja pegawai, meningkatkan produktivitas kerja dan juga meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Mengenai pemberian motivasi terhadap petugas terminal sudu Kabupaten Enrekang telah dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HL selaku Seksi terminal mengatakan bahwa:

“Seminggu dua kali kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar kami juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.” (Wawancara dengan HL, 20 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dua kali seminggu dilakukan pengawasan dan juga memberikan pengarahan kepada para petugas terminal.

Terkait hasil wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor terminal sudu mengatakan bahwa:

“Untuk memotivasi para kolektor disini saya biasa memberikan mereka makanan dan minuman agar mereka selalu semangat dalam melakukan tugasnya.” (Wawancara dengan HN, 20 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi kepada para kolektor hanya dua kali seminggu, pengarahan ini masih harus ditambah insentitas waktunya karna mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

Wawancara dengan AN selaku kolektor pemungutan retribusi terminal menyatakan bahwa:

“Untuk motivasi yang diberikan kepada kami yaitu kepala Dinas yang memiliki sifat yang baik dan ramah dan bagus diajak bicara. Hal ini salah satunya menurut saya yang menjadi motivasi bagi kami. Selain itu juga, bapak kepala Dinas biasa mengajak kami untuk liburan setiap bulannya agar kami semangat kerja.” (Wawancara dengan AN, 22 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sikap ramah dan baik hati kepala Dinas Perhubungan menjadi motivasi bagi para petugas terminal. Terkait dengan pemberian motivasi berdasarkan wawancara dengan HS selaku kolektor pemungutan retribusi berkata bahwa:

“Mengenai motivasi yang diberikan kepada kami tidak banyak karena menurut saya sikap para pihak dinas yang loyal dan komunikasi mereka yang baik kepada kami membuat kami mersa sangat senang dan otomatis hal

itu yang membuat kami semangat dalam bekerja.” (Wawancara dengan HS, 22 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sikap baik yang dimiliki oleh kepala Dinas serta komunikasi yang baik antara para petugas dengan para pihak dinas perhubungan yang baik menjadi motivasi bagi para petugas terminal Sudu Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AD selaku kolektor pemungutan retribusi mengatakan bahwa:

“Iya, benar bahwa motivasi kami bekerja di terminal Sudu ini memang dari pihak Dinas perhubungan karena komunikasi antara para petugas terminal dan pihak dinas sangatlah baik dan juga pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada sangat positif.” (Wawancara dengan AD, 22 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin baik antara para petugas dengan para pihak dinas yang baik serta pengarahan yang diberikan bersifat positif menjadi motivasi bagi para petugas terminal.

### **3.b Sistem penggajian kepada petugas terminal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan MK selaku Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang mengatakan bahwa:

“Kadang-kadang kepala dinas memberikan uang saku bagi para kolektor bila target yang direncanakan tercapai dengan baik dari uang pribadinya sendiri itu dilakukan agar dapat memotivasi para kolektor untuk dapat bekerja lebih baik lagi.” (Wawancara dengan MK, 20 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa apabila target yang direncanakan tercapai maka kepala dinas terkadang memberikan uang saku kepada para kolektor agar dapat memotivasi para kolektor dalam menjalankan tugasnya.

Bentuk penggerakan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana sistem penggajian para kolektor/pemungut retribusi terminal Sudu dan adakah reward yang di berikan jika target yang direncanakan bisa tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HL selaku Kepala seksi terminal menyatakan bahwa:

“Tidak ada insentif atau penghargaan khusus yang di berikan kepada pegawai yang kinerjanya bagus. Kebanyakan kolektor yang bertugas berstatus sebagai honor daerah jadi kolektor yang kinerjanya bagus kami usahakan memasukan filenya supaya bisa jadi pegawai negeri itu pun tidak kami janjikan karena memang sulit.” (wawancara dengan HL, 20 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pemberian intensif ataupun penghargaan khusus dari pihak dinas melainkan pegawai yang berstatus honorer yang kinerjanya bagus diusahakan untuk memasukkan filenya agar bias menjadi PNS.

Wawancara dengan AD selaku kolektor pemungut retribusi terminal Sudu mengatakan bahwa:

“Kami memang pernah mendapat bonus dari Kepala Dinas tapi sangat jarang dan jumlahnya tidak seberapa.” (wawancara dengan AD, 22 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak memberikan penghargaan khusus kepada kolektor yang kerja dengan baik, tapi terkadang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebagai motivasi agar para kolektor dapat bekerja lebih baik lagi.

Sedangkan sistem penggajian para kolektor menurut HL Kepala Seksi Terminal mengatakan bahwa:

“Kolektor pemungut retribusi Terminal Sudu yang berstatus sebagai tenaga honorer digaji per tiga bulan dan itu sudah menjadi aturan daerah.” Wawancara dengan HL, 22 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa petugas yang berstatus sebagai tenaga honorer di gaji pertiga bulan sesuai aturan daerah.

Wawancara dengan HS selaku kolektor pemungutan retribusi terminal mengatakan bahwa:

“Kami harap pemerintah daerah lebih memperhatikan gaji kami karena gaji yang biasanya di dapatkan per tiga bulan sering sekali menunggak dan tidak tepat waktu, bahkan pernah kami bekerja selama setahun tanpa mendapatkan gaji bagaimana kami semangat bekerja kalau pemerintah tidak memperhatikan gaji kami.” (wawancara dengan HS, 25 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa system penggajian para kolektor yang kadang-kadang terlambat membuat mereka tidak semangat dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini karena ini sangat berpengaruh pada kinerja para kolektor.

#### **4. Pengawasan (Controlling)**

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi terminal Sudu di Kab. Enrekang yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi terminal Sudu tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan

pemungutan retribusi di terminal Sudu Kab. Enrekang. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi terminal dapat ditekan seminimal mungkin. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan meliputi (a) pengawasan langsung dan (b) pengawasan tidak langsung kepada petugas terminal yang melakukan pemungutan retribusi terminal kepada masyarakat (pengguna jasa).

#### **4.a Pengawasan Langsung**

Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi Kabupaten Enrekang dan kepala seksi terminal yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi terminal Sudu di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HL selaku Kepala seksi terminal menyatakan bahwa:

“Setiap hari pasar yakni hari selasa dan hari jum’at, kami turun kelapangan untuk mengecek kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi di terminal sudah membayar kewajibannya.” (Hasil wawancara HL, 28 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa dinas terkait melakukan pengawasan kepada kolektor pemungut retribusi setiap hari selasa dan jum’at.

Terkait hasil Wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor mengatakan bahwa:



“Untuk para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, kami hanya memberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya, namun untuk pemberian sanksi yang lebih tegas belum ada diperaturan daerah, sehingga kami hanya memberikan pengarahan saja.” (Hasil wawancara dengan HN, 28 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa pengarahan dan peringatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MK selaku kepala dinas perhubungan informasi dan komunikasi menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan pengawasan kepada para petugas maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi terminal, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui petugas mana yang melakukan penyimpangan bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi”. (Hasil wawancara dengan MK, 28 Maret 2017).

Terkait dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan Koordinator Pemungutan Retribusi Terminal sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi terminal setiap turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Enrekang.

Wawancara dengan HL selaku kepala seksi terminal menyatakan bahwa:

“Untuk para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, kami hanya memberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, karena dalam perbup yang kami pedomani tidak tercantum sanksi yang tegas. namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya.” (Hasil wawancara dengan HL, 28 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan HL di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan petugas yang melakukan kesalahan dan penyimpangan hanya diberikan sanksi yaitu pengarahan dan peringatan saja karena dalam PERBUP tidak dicantumkan sanksi yang tegas. Penyimpangan sering terjadi karena pengawasan yang dilakukan belum efektif sehingga para petugas dan sopir mengulangi kesalahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JH selaku masyarakat (pengguna jasa) mengemukakan bahwa:

“Sampai saat ini jika saya melanggar saya hanya dikasi peringatan dan pengarahan saja. Saya tidak pernah di beri sanksi yang tegas dari petugas terminal disini.” (Hasil wawancara dengan JH, 30 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa sanksi yang tegas tidak pernah diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran melainkan hanya sanksi peringatan.

Wawancara dengan SN selaku Kolektor pemungutan retribusi terminal mengemukakan bahwa:

“Iya betul, kami tidak pernah diberi sanksi yang berat apabila melakukan pelanggaran. Sebenarnya ada tapi itu hanya pengarahan saja. Sehingga masih banyak para petugas dan sopir yang mengulangi kesalahannya.” (Hasil wawancara dengan SN, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN maka penulis menyimpulkan bahwa ketegasan pihak pengawas harus ditingkatkan agar petugas dan masyarakat pengguna jasa terminal dalam proses pemungutan retribusi terminal tidak selalu melakukan pelanggaran.

#### **4.b Pengawasan Tidak Langsung**

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan

secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh MK Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Enrekang bahwa:

“Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi Kabid Keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi terminal. Kami juga melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis) perbulannya.” (Hasil wawancara dengan MK, 2 April 2017).

Hasil wawancara dengan MK dapat disimpulkan bahwa dinas terkait melakukan pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan penerimaan retribusi perbulannya kemudian dievaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam proses pemungutan retribusi.

Wawancara dengan HL selaku Kepala seksi terminal mengemukakan bahwa:

“Mengenai laporan penerimaan pemungutan itu di hitung juga berapa jumlah karcis yang keluar. Dan setiap harinya itu kita mengeluarkan 200 karcis namun kadang karcisnya habis kadang tidak”. (Hasil wawancara dengan HL, 2 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan HL di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam laporan penerimaan pemungutan retribusi dilakukan dengan menghitung jumlah karcis yang keluar.

Berdasarkan wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor pemungutan retribusi terminal mengatakan bahwa:

“Petugas atau kolektor retribusi melaporkan hasil pemungutan melalui saya selaku kordinator kolektor kemudian ke Kepala seksi terminal selanjutnya diserahkan ke bendahara penerimaan retribusi. (Hasil wawancara dengan HN, 5 April 2017).

Terkait hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kordinator kolektor melaporkan hasil pemungutan ke kepala seksi terminal kemudian diserahkan ke bendahara penerimaan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN selaku Kepala Seksi Terminal mengatakan bahwa:

“Mengenai pelaporan/penyetoran retribusi terminal biasanya disetor tiap akhir bulan. Caranya yaitu kami sebagai kordinator kolektor membawa laporan mingguan langsung kekantor Dinas Perhubungan, Infokom Kabupaten Enrekang dan kemudian diolah oleh pegawai dinas yang berwenang”. (Hasil wawancara dengan SN, 7 April 2017).

Mengenai hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyetoran atau pelaporan retribusi terminal dilakukan setiap akhir bulan kemudian diolah oleh pegawai dinas yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN selaku Kolektor pemungutan retribusi terminal menyatakan bahwa:

“Setiap hari selasa dan jum'at sekitar jam 08.30 - sore kami diawasi oleh kordinator kolektor. Kemudian sorenya lagi bapak Kordinator Kolektor mengevaluasi hasil pemungutannya. Dan hasilnya itu yang dimasukkan di laporan mingguan yang disetor setiap akhir bulan ke pihak dinas terkait untuk dikelola.” (Hasil wawancara dengan AN, 10 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan penerimaan retribusi dimasukkan di laporan mingguan oleh kordinator kolektor kemudian disetor tiap akhir bulan ke pihak dinas untuk dikelola.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan retribusi terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pada indikator perencanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu (a) Perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal masih belum efektif karena tidak di dukung dengan data-data yang akurat mengenai potensi yang di miliki oleh terminal khususnya dengan menyesuaikan jumlah kendaraan yang masuk dalam wajib retribusi. (b) Perencanaan penentuan fasilitas terminal dalam hal ini pemerintah telah berupaya meningkatkan fasilitas dalam terminal namun, terkendala hal anggaran sehingga sampai saat ini fasilitas terminal Sudu masih kurang lengkap.
2. Pengorganisasian meliputi (a) Sumber daya manusia dalam hal ini para petugas terminal yang sudah seimbang dengan jumlah pekerjaan dan wajib retribusi yang ada di terminal. (b) Cara pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh para kolektor yang berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Penggerakan dalam hal ini meliputi (a) Motivasi kepada para petugas terminal yaitu terjalinnya komunikasi yang baik antara para petugas dengan pihak dinas dan pemberian pengarahan yang bersifat positif (b) system penggajian kepada

para petugas terminal penggajian para kolektor yang tidak tepat waktu membuat kinerja para kolektor tidak efektif.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini meliputi (a) Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu turun langsung ke lapangan mengawasi para petugas dalam pemungutan retribusi namun dalam hal ini hasil pengawasannya masih kurang optimal karena pengawasan dilakukan tidak rutin setiap hari melainkan hanya dua kali satu minggu, (b) Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan berdasarkan laporan penerimaan retribusi mingguan yang diserahkan para kordinator kolektor setiap akhir bulan kemudian di evaluasi setiap tahunnya oleh pihak dinas yang berwenang

#### **B. Saran**

1. Dalam proses perencanaan, pemerintah seharusnya memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi terminal secara insentif terutama pendataan terhadap wajib retribusi terminal agar realisasi penerimaan retribusi terminal dapat mencapai target yang telah ditentukan.
2. Proses penggerakkan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi agar dapat memperhatikan kesejahteraan para kolektornya yakni memberikan gaji kolektor tepat waktu dan juga dapat memberikan bonus sebagai motivasi agar kinerja para kolektor menjadi lebih baik.
3. Proses pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi agar melakukan pengawasan langsung di lapangan secara rutin setiap hari untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi agar pengelolaan retribusi terminal bisa efektif.

4. Diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada petugas dan pengguna jasa yang melakukan pelanggaran.
5. Bagi masyarakat pengguna jasa diharapkan mematuhi aturan yang berlaku dalam terminal sehingga ketertiban dan keamanan dapat terjaga.
6. Pemerintah harus sadar pentingnya pengelolaan terhadap retribusi terminal karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Bumi Aksara.
- Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko, T. Hani, 2009. *Manajemen*. Cetakan Duapuluh, Yogyakarta: BPEE.
- Hasibuan, Malayu, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L.J, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riwu Kaho, Josef. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto., 2003. *Manajemen Tenaga Kerja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siagian, P.Sondang, 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber, 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Simbolon, Maringan Masri, 2004. *Dasar-Dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, 2005/2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutikno, Sobry, 2009. *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul*. Lombok: Holoistica.
- Syaripuddin.2010. "*Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng*" Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Terry R.George & Leslie W. Rue, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerjemah G.A Ticolu. Jakarta: Bumi Akasara. Judul asli *Principles of manajement*.



1992.Dow Jones-Irwin.

Terry R.George, 2000. *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Edisi Bahasa Indonesia). Bandung: Bumi Aksara.

Tim Penyusun 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*. Makassar.

Usman, Husaini, 2008. *Manajemen:Teori,Praktik,Dan Riset Pendidikan*. Jakarta.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Amiruddin,2016. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya*. Diakses pada 12 Juli 2016 (<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19374>).

<Http://RakyatSulsel.Com/WargaKeluhkan-Terminal-Sudu-Enrekang.Html>.

<Https://jurnal-sdm.blogspot.co.id>.

Rahman,Habibi, 2011 Tesis: “*Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka Di Kabupaten Enrekang, Universitas Hasanuddin Makassar.*” (<Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitsream/Handle/123456789/1161/Habibi/%Rahman.Pdf?Sequene=1>).

### **Dokumen Perundang-Undangan**

Arsip Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Enrekang

Laporan Realisasi Penerimaan retribusi Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2016.

Peraturan Bupati No 7 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.40.Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 71 Tahun 2016

Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Perda Kabupaten Enrekang No. 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Terminal.

Undang-Undang .No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

UU 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.



# PENGELOLAAN TERMINAL SUDU DI KECAMTAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

Zulfitri<sup>1</sup>, Musliha Karim<sup>2</sup>, Muhammad Idris<sup>3</sup>

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

## ABSTRACT

*The aim of this research is finding out restributor Management of Sudu station in Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. The method was applied in this research is descriptive qualitative with fenomology research type. Data collection techniques was used are interview which has nine informans, observation, and documentation. Data analysis techniques are reduction, data application, and conclusion. Validity of the data used triangulation of resources, time, and techniques. The result shows the restribution management of Sudu station Kabupaten Enrekang is still under of target, and it makes the income of Kabupaten Enrekang is very low and facilities is still out of completed.*

**Key Words:** *Management, Restribution, Station.*

## ABSTRACT

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan retribusi terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe fenomenologi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan Sembilan orang, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi terminal sudu Kabupaten Enrekang belum optimal dilihat dari realisasi penerimaan retribusi terminal tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan terhadap PAD Kabupaten Enrekang sangat rendah dan fasilitas di terminal masih belum lengkap.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Retribusi, Terminal.*

## PENDAHULUAN

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Berdasarkan PM No. 132 Th. 2015, penyelenggaraan terminal angkutan umum harus dilengkapi dengan fasilitas didalamnya baik itu fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, agar kendaraan yang masuk ke area terminal bisa lebih tertib dan mematuhi rambu-rambu yang telah disediakan.

Kondisi fasilitas utama ataupun penunjang pada terminal pada umumnya sangat tidak layak dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Dari beberapa permasalahan yang timbul menyebabkan sistem manajemen pada setiap terminal yang ada semakin menurun sehingga sangat diperlukan tentang adanya pengelolaan terminal. Pengelolaan terminal merupakan salah satu variabel yang berperan dalam pengembangan transportasi, dapat

menunjang aktivitas para pengguna jasa angkutan umum, dan pengelolaan retribusi terminal memiliki potensi besar memberikan masukan pada kas daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. Pemasukan daerah yang berasal dari PAD yang semakin menurun dari tahun ke tahun menjadi tumpuan yang utama dan dimaksimalkan oleh daerah, sehingga upaya-upaya dalam pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus digali.

Komponen yang mendukung PAD itu adalah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengelolaan retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan serta kebutuhan suatu daerah. Retribusi terminal merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang yang bersumber dari retribusi daerah.

Hal ini terdapat dalam Perda Kabupaten Enrekang No.10 Tahun 2011 tentang retribusi izin terminal.

Berdasarkan hasil pra-riset Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa penyebab belum mencapai target karena kendaraan tidak mau masuk terminal, dan Fasilitas terminal belum lengkap.

Pengelolaan terhadap retribusi terminal sudu Kabupaten Enrekang dinilai belum optimal akibatnya realisasi penerimaan retribusi terminal tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah daerah sehingga sangat perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah.

Terry (2009:9) mengemukakan pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memiliki arti proses perbuatan dan cara mengolah melakukan sesuatu kegiatan dengan mengarahkan orang

lain, dan proses mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Siswanto, (2006:21) pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

G.R.Terry dalam H.Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sondang P Siagian (2005:36) mengatakan bahwa perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan, secara matang tentang hal-hal yang dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan tugas-tugas, pekerjaan, wewenang, peran-peran termasuk koordinasi hubungan-hubungan antar bagian baik secara vertikal maupun

horizontal dalam suatu struktur organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Semakin jelas dan terpadu tugas-tugas yang dirancang dalam suatu organisasi akan semakin efektif organisasi itu mencapai tujuannya (Ulber Silalahi, 2011:184).

Menurut (Siswanto, 2006:75) Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka dan pemberian lingkungan serta fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Penggerakkan (Actuating) merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.

Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa, (a) Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik, (b) Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Dan, (c) Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya

Siswanto dan Sastrohadiwiryo, (2003:26) pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan

dua macam teknik, yaitu : pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Sedangkan, yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa para bawahan sering kali hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Josef Riwu Kaho (2003:17) Retribusi Daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara ataupun merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk.

Ahmad Yani (2002:56), Jenis Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 13 adalah “Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedia fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal

Syaripuddin (2010:34) mengemukakan bahwa retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/ barang dengan kendaraan umum. Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang

serta perpindahan moda angkutan. Undang-Undang No 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah.

Menurut UU 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri dari (a) Hasil pajak daerah, (b) Hasil Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Josef Riwu Kaho (2003:143) Sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Perusahaan daerah. Dinas daerah, dan Pendapatan daerah lainnya.

Adapun yang menjadi variable pengelolaan meliputi 4 indikator diantaranya adalah Perencanaan yaitu perencanaan penentuan target dan perencanaan penentuan fasilitas terminal. Pengorganisasian meliputi Sumber daya manusia dan cara pelaksanaan pemungutan retribusi. Penggerakkan yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan, dan Pengawasan yaitu dengan indikator pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

## **METODE PENELITIAN**

Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan dilaksanakan di Dinas Perhubungan, Infokom Kabupaten Enrekang dan di terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif



yaitu pendekatan yang diarahkan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan fenomena, fakta-atau kejadian secara sistematis dan akurat sedangkan tipe penelitian ini adalah Fenomenologi yang menjelaskan suatu fakta atau realita dengan informan penelitian sebanyak sembilan orang.

Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan sumber informasi tentang kondisi penelitian.

Wawancara metode yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan dengan para informan untuk memperoleh data, baik dengan menggunakan daftar pertanyaan ataupun percakapan bebas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data sekunder dan data primer. Data

tersebut dianalisis secara deskriptif di interpretasi pada informan dengan melakukan wawancara informan kemudian mengecek kembali data tersebut untuk memahami secara mendalam serta teori-teori yang sesuai dengan data tersebut yang dikumpulkan agar dapat menghasilkan penelitian bermutu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Retribusi Terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Infokom Kabupaten Enrekang khususnya Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang melakukan tugas di bidang Pengelolaan Terminal. Dengan ini peneliti akan menjelaskan tiga indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi terminal yang meliputi (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penggerakkan dan (d) pengawasan.

Perencanaan adalah pemilihan dan putusan sekumpulan kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan putusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan,

bagaimana dan oleh siapa. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dan kondisi di waktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya-sumber daya akan lebih efektif didalam pemanfaatannya.

Mencelaah mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang dalam bidang pengelolaan Terminal, maka terdapat dua indikator meliputi (a) perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal dan (b) perencanaan penentuan fasilitas terminal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut. Pengelolaan retribusi terminal tidak lepas dari perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal karena merupakan suatu hal yang penting dalam peningkatan realisasi

penerimaan retribusi terminal. Perencanaan penentuan target anggaran senantiasa dilakukan tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki terminal. Sehingga hampir setiap tahunnya realisasi retribusi terminal tidak pernah mencapai target.

Belum tercapainya target penerimaan ini memunculkan banyak spekulasi. Diantaranya soal lemahnya prediksi potensi penerimaan atau tingginya target yang ditetapkan Pemda Kabupaten Enrekang. Jadi untuk penetapan target harusnya disesuaikan dengan potensi yang ada khususnya pada jumlah angkutan yang ada.

Perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi terminal dilakukan musyawarah oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain kepala dinas Perhubungan, Infokom, seksi terminal, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan DPRD Kabupaten Enrekang kemudian setelah mencapai kesepakatan barulah target yang disetujui direalisasikan,. Penentuan target anggaran senantiasa dilakukan tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki terminal. Sehingga hampir setiap tahunnya

realisasi retribusi terminal tidak pernah mencapai target. Jadi, untuk penetapan target harusnya disesuaikan dengan potensi yang ada, Khususnya pada jumlah angkutan yang ada. Selain itu, penentuan target anggaran berdasarkan pada realisasi yang dicapai dari tahun sebelumnya sehingga penentuan target selalu berubah-ubah.

Mengenai data tentang potensi sebenarnya yang tidak akurat menyebabkan realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, hal lain yang menyebabkan sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yaitu karena para petugas pemungut retribusi terminal kesulitan dalam mendata setiap masyarakat (pengguna jasa) dan masih banyak kendaraan yang tidak mau masuk keterminal.

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat realisasi penerimaan retribusi terminal Sudu mulai tahun 2014-2016 dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi penerimaan dari tahun ketahun. Tahun 2014 Realisasi penerimaan yang melebihi target yaitu 7.050.000 atau 141 persen dari target anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2015 realisasi penerimaan

menurun yaitu 6.544.00 atau 81,8 persen dari target anggaran. Dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan yaitu 5.304.000 atau 66.3 persen dari target yang telah ditetapkan dan hal inirealisasi tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target anggaran retribusi. Perencanaan penentuan fasilitas terminal bahwa pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyediakan fasilitas dalam terminal agar masyarakat merasa nyaman.

Pemerintah dinas terkait sudah berupaya mengoptimalkan dalam perbaikan fasilitas terminal seperti perbaikan jalan namun, terkendala dalam anggaran, oleh karena itu, fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat dalam terminal masih kurang lengkap salah satunya fasilitas peribadatan (Musholla), papan rambu lalu lintas, dan lain-lain sehingga, masih banyak masyarakat yang malas masuk kelokasi terminal. Indikator kedua yaitu mengenai pengorganisasian. Istilah organisasi yang didefinisikan secara statis diartikan sebagai suatu gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas dan tanggung jawab dan hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau suatu

lembaga sedangkan secara dinamis diartikan sebagai suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan.

Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan pegawai/ karyawan

sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti (a) sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, (b) cara pelaksanaan pemungutan retribusi. Kedua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal. Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian.

Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogianya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Sumber daya manusia yang digunakan yaitu Jumlah pegawai/kolektor yang melaksanakan pemungutan retribusi di terminal Sudu sudah sangat seimbang dengan wajib retribusi yang ada di terminal. Dengan demikian pemungutan retribusi di terminal Sudu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. pemungutan retribusi dalam pemungutan retribusi dengan memberikan karcis secara langsung kepada masyarakat (pengguna jasa).

Kolektor yang ditugaskan di terminal Sudu berjumlah 10 orang yang kemudian dibagi tugas yaitu bagian sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil truk. Kolektor pemungutan retribusi bagian sepeda motor lebih banyak dibandingkan dengan kolektor di bagian mobil. Dan lokasi parkir motor dan mobil pun berbeda.

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal Sudu di Kab. Enrekang dilakukan hari senin, selasa, Kamis dan hari jumat. Pelaksanaan dan pembayaran retribusi terminal yang dilakukan oleh para kolektor cukup baik karena para kolektor langsung mendatangi para pengguna jasa dan memberikan langsung karcis sehingga para

pengguna jasa terminal cukup mudah dalam membayar tariff retribusi. Aparat terminal telah melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan yaitu PERBUP Kab.Enrekang No.7 Tahun 2016. Kolektor pemungutan retribusi dalam pemungutan retribusi dengan memberikan karcis secara langsung kepada masyarakat (pengguna jasa). Indikator ketiga yaitu penggerakkan (actuating) artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Penggerakkan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, penggerakkan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri.

Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun indikator penggerakkan meliputi dua hal yaitu (a) pemberian

motivasi kepada para petugas terminal, dan (b) sistem penggajian kepada para petugas terminal.

Pemberian motivasi tidak terlepas dari kebutuhan individu itu sendiri dan berbagai fakta internal yang membuat seseorang puas. Pemberian motivasi para pegawai terminal dapat bertujuan untuk mendorong gairah dan semangat kerja pegawai, meningkatkan produktivitas kerja dan juga meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Mengenai pemberian motivasi terhadap petugas terminal sudu Kabupaten Enrekang telah dilakukan oleh pemerintah.

Komunikasi yang terjalin baik antara para petugas dengan para pihak dinas yang baik serta pengarahan yang diberikan bersifat positif menjadi motivasi bagi para petugas terminal. pengarahan ini masih harus ditambah insentitas waktunya karna mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

Bentuk penggerakan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana sistem penggajian para kolektor/ pemungut retribusi terminal Sudu dan adakah reward yang di berikan jika target yang direncanakan bisa tercapai. Pemerintah tidak memberikan penghargaan khusus kepada kolektor yang kerja dengan baik, tapi terkadang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebagai motivasi agar para kolektor dapat bekerja lebih baik lagi. System penggajian para kolektor yang kadang-kadang terlambat membuat mereka tidak semangat dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini karena ini sangat berpengaruh pada kinerja para kolektor.

Fungsi manajemen yang diangkat penulis merupakan fungsi manajemen yang ke empat yaitu pengawasan (controlling) Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan di sini yaitu proses

pemantauan yang dilakukan oleh tim pemungut retribusi terminal. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir. Demikian halnya dalam pemungutan retribusi terminal Sudu di Kab. Enrekang yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi terminal Sudu tanpa dilakukan pengawasan maka, akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan

pemungutan retribusi di terminal Sudu Kab. Enrekang. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi terminal dapat ditekan seminimal mungkin.

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan meliputi (a) pengawasan langsung dan (b) pengawasan tidak langsung kepada petugas terminal yang melakukan pemungutan retribusi terminal kepada masyarakat (pengguna jasa). Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi Kabupaten Enrekang dan kepala seksi terminal yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi terminal Sudu di Kabupaten Enrekang.

Para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, hanya diberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya, dan lebih bertanggung jawab pada tugas yang

diberikan, karena dalam perbup yang dipedomani tidak tercantum sanksi yang tegas. Namun para pemerintah daerah tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya.

Setiap hari pasar yakni hari selasa dan hari jum'at, para pengawas langsung kelapangan untuk mengecek kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa apakah semua wajib retribusi diterminal sudah membayar kewajibannya. Pengawasan langsung dilakukan Koordinator Pemungutan Retribusi Terminal sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi terminal setiap turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Enrekang.

Dinas terkait melakukan pengawasan kepada kolektor pemungut retribusi setiap hari selasa dan jum'at, masyarakat dan petugas

yang melakukan kesalahan dan penyimpangan hanya diberikan sanksi yaitu pengarahannya dan peringatan saja karena dalam PERBUP tidak dicantumkan sanksi yang tegas.

Penyimpangan sering terjadi karena pengawasan yang dilakukan belum efektif sehingga para petugas dan sopir mengulangi kesalahannya oleh karena itu, ketegasan pihak pengawas harus ditingkatkan agar petugas dan masyarakat pengguna jasa terminal dalam proses pemungutan retribusi terminal tidak selalu melakukan pelanggaran.

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan meminta laporan penerimaan retribusi Kabid Keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi terminal dan juga melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis) perbulannya melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Dinas terkait melakukan pengawasan tidak



langsung dengan meminta laporan penerimaan retribusi perbulannya kemudian dievaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam proses pemungutan retribusi dan dalam laporan penerimaan pemungutan retribusi dilakukan dengan menghitung jumlah karcis yang keluar.

Kordinator kolektor melaporkan hasil pemungutan ke kepala seksi terminal kemudian diserahkan ke bendahara penerimaan retribusi. Penyetoran atau pelaporan retribusi terminal dilakukan setiap akhir bulan kemudian diolah oleh pegawai Dinas yang berwenang. Laporan penerimaan retribusi dimasukkan di laporan mingguan oleh kordinator kolektor kemudian disetor tiap akhir bulan ke pihak dinas untuk dikelola.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan terminal sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Pada indikator perencanaan Pada indikator perencanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu (a)

Perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal masih belum efektif karena tidak di dukung dengan data-data yang akurat mengenai potensi yang di miliki oleh terminal khususnya dengan menyesuaikan jumlah kendaraan yang masuk dalam wajib retribusi.

(b) Perencanaan penentuan fasilitas terminal dalam hal ini pemerintah telah berupaya meningkatkan fasilitas dalam terminal namun, terkendala hal anggaran sehingga sampai saat ini fasilitas terminal Sudu masih kurang lengkap.

Pengorganisasian meliputi (a) Sumber daya manusia dalam hal ini para petugas terminal yang sudah seimbang dengan jumlah pekerjaan dan wajib retribusi yang ada di terminal. (b) Cara pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh para kolektor yang berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penggerakan dalam hal ini meliputi (a) Pemberian motivasi kepada para petugas terminal yaitu terjalannya komunikasi yang baik antara para petugas dengan pihak dinas dan pemberian pengarahan yang bersifat positif (b) sistem penggajian kepada para petugas

terminal penggajian para kolektor yang tidak tepat waktu membuat kinerja para kolektor tidak efektif.

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini meliputi (a) Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu turun langsung ke lapangan mengawasi para petugas dalam pemungutan retribusi namun dalam hal ini hasil pengawasannya masih kurang optimal karena pengawasan dilakukan tidak rutin setiap hari melainkan hanya dua kali satu minggu, (b) Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan berdasarkan laporan penerimaan retribusi mingguan yang diserahkan para kordinator kolektor setiap akhir bulan kemudian di evaluasi setiap tahunnya oleh pihak dinas yang berwenang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Bumi Aksara.
- Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Riwu Kaho, Josef. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto., 2003. *Manajemen Tenaga Kerja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siagian, P.Sondang, 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber, 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siswanto., 2005/2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaripuddin. 2010. *Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Terry R.George & Leslie W. Rue, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerjemah G.A Ticolu. Jakarta: Bumi Akasara. Judul asli *Principles of management*. 1992. Dow Jones-Irwin.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di*
- Arsip 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Enrekang
- Laporan *Realisasi Penerimaan retribusi Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2016*.
- Peraturan Bupati No 7 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 132 Tahun 2015 Tentang

*Penyelenggaraan Terminal  
Penumpang Angkutan Jalan.  
Perda Kabupaten Enrekang No. 10  
Tahun 2011 Tentang  
Retribusi Izin Terminal.  
UU 34 Tahun 2000 Tentang Pajak  
Daerah*



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Zulfitri, disapa Fitri. Lahir pada tanggal 20 Februari 1995 di Pamolongan, Enrekang, Sulawesi Selatan. Anak terakhir dari tujuh bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Siraman dan Lahasia (Almh). Penulis menempuh pendidikan pertama selama enam tahun di SDN 148 Pamolongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 1 Alla' Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Alla' Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.